

Tingkatkan Kinerja PNS Pemkot Sungaipenuh teken MoU dengan Pemprov Jambi

Jambi - Selasa pagi (8/10/2019) suasana di kota Sungaipenuh sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya. Hari itu ada kegiatan tingkat provinsi Jambi yang dipusatkan di Sungai penuh, yakni kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Sungaipenuh dan Pemerintah Provinsi Jambi tentang Replikasi Aplikasi SKP Online.

Prosesi penandatanganan MoU itu dilaksanakan di Kantor BKPSDM Kota Sungaipenuh. Sebelumnya Provinsi Jambi telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pendampingan dan replikasi aplikasi SKP Online dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang awalnya membuat aplikasi SKP Online.

Mewakili Gubernur Jambi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi H. Husairi, S.IP., M.E. sedangkan yang mewakili Walikota Sungaipenuh adalah Kepala BKPSDM Kota Sungaipenuh Dedi Wahyudi, S.Pt., M.Si dan difasilitasi oleh Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Novriadi, AP., M.Si.

Dalam sambutannya Dedi Wahyudi berharap dengan adanya SKP Online dapat mendorong kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungaipenuh agar lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Sungaipenuh

"Kalaulah kinerja pegawai terukur, tunjangan untuk PNS akan lebih akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanah dalam MoU antara Walikota Sungaipenuh dengan Korsupgah KPK RI untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi terintegrasi di Sungaipenuh. Tidak lupa Pemerintah Kota Sungaipenuh juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bimbingan dan pendampingan dalam proses Implementasi TPP berbasis kinerja di Pemkot Sungaipenuh". ungkapnya.

Sementara itu Kepala BKD Provinsi Jambi, Bapak Husairi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keinginan Pemkot Sungaipenuh dalam menjalankan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dan bersedia menjadikan Provinsi Jambi sebagai rujukan pelaksanaannya. Kemudian Bapak Husairi menyampaikan pengalaman Provinsi Jambi dalam proses implementasi SKP Online, faktor terpenting adalah partisipasi pegawai yang menggunakan aplikasi ini, tanpa partisipasi pegawai yang maksimal tidak akan berhasil.

Oleh karenanya, upaya untuk memberikan layanan yang tuntas bagi kebutuhan pegawai dalam menjalankan aplikasi SKP Online ini perlu diperhatikan. Jika regulasi sudah ada, insentif berupa TPP sudah tersedia, server dan aplikasi sudah siap, dan pegawai sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi SKP Online, maka saluran komunikasi antara pegawai dan pengelola aplikasi perlu

dibuka seluas-luasnya, pusat informasi dan tempat bertanya mengenai SKP Online perlu dipastikan dapat memberikan layanan terbaik bagi kebutuhan pegawai.

